

## Laju Urbanisasi dan Pertumbuhan Kota di Indonesia

**Abdul Rahman**

*Universitas Negeri Makassar*

*Jl. Andi Pangerang Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan*

*E-mail: [abdul.rahman8304@unm.ac.id](mailto:abdul.rahman8304@unm.ac.id)*

**Abstract:** *Urbanization always give negative and positive influences to the development in any sectors. Impact that has been occurred from this process is not only be implicated to the aspect of spacing, but also to social, economy, and cultural aspect. The consequences of urbanization flow rapidly to urban area will cause the slum settlements spread widely, and the micro informal sectors are mushrooming. Informal sector is really developed rapidly and profitable, but it has a consequence to the increasing of poverty. This condition will disturb the urban structure because buffer area like "DAS" will be the target of settlement. The increasing of labor force which could not be involved in the industry are able to bring about internal conflict in the sector of manpower, like unemployment. Social and services facilities became increasingly as a reaction of user demand, however the benefit does not spread evenly because of high cost operating. The analysis of secondary data in this article/writing will try to show the urbanization condition in Indonesia and its developments.*

**Keywords:** *Informal Sector, Urbanization, Urban Growth*

### PENDAHULUAN

Persoalan negara berkembang tidak hanya eksklusif di Indonesia, yaitu arus urbanisasi dari perdesaan ke perkotaan. Kota besar menjadi magnet atraktif bagi tenaga kerja untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Paling tidak, terdapat dua alasan urbanisasi. Pertama, pull-factors, terpusatnya fasilitas infrastruktur dalam hal ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hiburan menjadi factor penarik orang datang ke kota besar. Kedua, push-factors di mana semakin sulitnya mendapatkan akses pekerjaan di perdesaan, alih kepemilikan lahan, dan kurangnya ketersediaan infrastruktur daerah menjadi pendorong terjadinya migrasi-internal ini. Fenomena mudik di Indonesia menjadi salah satu parameter untuk mendeteksi tingginya arus urbanisasi (Syah, 2013).

Departemen Perhubungan memprediksi tahun ini tidak kurang 10 persen (27,5 juta orang) dari total penduduk Indonesia keluar dari kota besar dan kembali ke daerah asal. Dari jumlah tersebut, 16,5 juta orang kembali dengan menggunakan kendaraan umum dan 11 juta lain menggunakan kendaraan pribadi. Persoalan kemacetan, tidak tertampungnya pemudik dan kriminalitas telah menyembunyikan persoalan mendasar, yaitu ketimpangan pembangunan ekonomi nasional. Derasnya urbanisasi menjadikan daya tampung kota besar dan sejumlah wilayah yang *relative overdeveloped* dibandingkan dengan yang lain akan menjadi semakin berat. Misalnya, terpusatnya aktivitas ekonomi di Pulau Jawa membuat daya tampung pulau ini semakin berat (*over-populated*). Dengan luas tidak lebih dari 7 persen dari total daratan Indonesia, terdapat 137 juta orang (60 persen) dari total penduduk Indonesia. Korelasi positif pada sejumlah persoalan seperti ketersediaan lapangan pekerjaan, kualitas hidup (air bersih, penanggulangan sampah, perkampungan kumuh), ekologi, kesehatan, kriminalitas perkotaan, rendahnya akses pendidikan dan tingginya kemiskinan perkotaan akan terjadi (Ervianto & Felasari, 2019).

Sementara itu, menurut Biro Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 berjumlah 25,90 juta orang di mana 12,22 persen penduduk miskin terdapat di perdesaan (Hasbullah, 2023). Meskipun jumlah penduduk miskin di perkotaan relatif lebih rendah dibandingkan dengan pedesaan, pengelolaannya tidak berarti menjadi lebih mudah. Secara sosiologis, ikatan sosial lebih kuat di perdesaan dibandingkan perkotaan. Semangat individualisme dan pragmatisme perkotaan mereduksi semangat kolektivitas .

Menjadikan orang miskin di kota tidak menjadi lebih baik kondisinya dibandingkan di perdesaan. Salah satu karakteristik mendasar migran-perdesaan adalah rendahnya kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan untuk bisa berkompetisi di sektor formal perkotaan. Sementara biaya hidup yang tinggi di perkotaan menuntut para migran untuk tetap mendapatkan pekerjaan guna menafkahi keluarga yang dibawa atau membantu keluarga di kampung halaman. Pada saat bersamaan, daya tampung sektor formal di perkotaan untuk menyerap tenaga kerja juga terbatas (*over-supply workers*).

Hal ini menghasilkan ledakan sektor informal perkotaan. Menjamurnya pedagang kaki lima (PKL), pembantu rumah tangga, pedagang kecil, penjaja makanan, dan pemulung sampah merupakan indikasi akan hal ini. Perlu adanya perubahan paradigma bagaimana kita melihat sektor informal perkotaan. Sering kita memberikan atribut dan stigma negatif atas sektor ini dengan menyebutnya sebagai *underground-economy*, kelas marginal, *non-formal economy*, dan ekonomi kumuh - perkotaan.

Terciptanya sektor informal, salah satunya, dikontribusi persoalan struktural atas ketimpangan pembangunan ekonomi nasional. Ketidakmerataan Pembangunan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan, Jawa, dan non-Jawa telah memunculkan informalisasi kegiatan ekonomi di perkotaan. Sampai kita belum bisa mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi, persoalan urbanisasi, migrasi-internal dan informalisasi ekonomi perkotaan akan terus tercipta. Tidak hanya di Jakarta, tetapi Makassar akan berbagai persoalan yang sama dengan kota-kota besar di Indonesia seperti Surabaya, Medan, Semarang, Bandung (Amini, Sugiharti, Aditina, & Meidika, 2020).

Dikotomi antara sektor formal dan informal perlu dihilangkan. Tantangan kedepan adalah bagaimana kedua sektor ekonomi ini bisa terkait satu dengan yang lain. Realitas di lapangan, sektor formal di Jakarta tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan dukungan dari sektor informal. Setiap perkantoran mewah di bilangan Sudirman dan Kuningan selalu diikuti munculnya pedagang makanan yang menyediakan sarapan pagi dan makan siang dengan harga murah. Setiap pembangunan apartemen mewah di beberapa kota besar selalu diikuti munculnya pasar-kaget yang menyediakan pasokan makanan, penginapan dan keperluan sehari-hari dari para buruh dengan harga terjangkau.

Para kontraktor (sektor formal) juga memasukkan unsur biaya buruh (*laborcost*) dengan mempertimbangkan kehadiran sektor informal ini. Sehingga biaya pembangunan infrastruktur sektor formal menjadi rendah setelah ditopang oleh sektor informal. Melihat realitas sosial tersebut, besar kemungkinan sektor informal menyubsidi sektor formal. Namun, mendamaikan antara sektor formal dan informal merupakan kebijakan jangka pendek dan menengah.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam menulis artikel ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mengkaji teori-teori dari berbagai sumber pustaka yang memiliki kaitan dengan topik kajian. Terdapat empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyediakan perlengkapan alat yang dibutuhkan, menyediakan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian (Zed, 2008). Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasan.

## **Pertumbuhan Kota**

Ekonomi perkotaan merupakan perpaduan antara geografi dan ekonomi. Ekonomi mengeksplorasi pilihan-pilihan orang ketika sumber daya terbatas. Orang menentukan pilihannya untuk memaksimalkan utilitas/kepuasan, sementara badan usaha memaksimalkan profit. Sedangkan geografi mempelajari bagaimana sesuatu diatur dalam ruang. Ekonomi perkotaan mengeksplorasi pilihan-pilihan lokasi dalam suatu ruang, yang dapat memaksimalkan utilitas/profit (Abdullah, Rakib, Hasan, Nurdiana, & Supatminingsih, 2022). Misal, seorang mahasiswa akan lebih suka untuk memilih lokasi tempat tinggal yang dekat dengan kampusnya. Sementara pengusaha lebih suka memilih lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku, tenaga kerja ataupun lokasi yang padat sebagai sasaran pasar dari produknya. Wilayah perkotaan didefinisikan sebagai wilayah geografis yang terdiri dari sejumlah penduduk dalam wilayah yang relatif sempit. Dengan kata lain, wilayah perkotaan memiliki kepadatan penduduk yang relatif tinggi disbanding sekitarnya.

Dalam ekonomi perkotaan, ada 2 jenis pertumbuhan; i) pertumbuhan ekonomi yang didefinisikan sebagai kenaikan pendapatan per kapita atau kenaikan upah rata-rata

kota, dan ii) pertumbuhan tenaga kerja yang didefinisikan sebagai kenaikan angkatan kerja total. Pertumbuhan ekonomi dapat bersumber dari: i) *capital deepening*, ii) kenaikan human capital/modal insani, dan iii) kemajuan teknologi. Dalam perspektif geografis, dapat ditambahkan sumber pertumbuhan keempat, yaitu iv) agglomerasi ekonomi. Sumber pertumbuhan pertama yakni *capital deepening* mencakup semua modal fisik yang digunakan oleh manusia untuk memproduksi barang dan jasa seperti mesin, peralatan atau bangunan. *Capital deepening* didefinisikan sebagai kenaikan modal per pekerja ini menaikkan produktivitas dan pendapatan, karena setiap pekerja bekerja dengan lebih banyak modal (Panorama, Litriani, & Kurniasih, 2019). Sumber pertumbuhan kedua berasal dari kenaikan modal insani, di mana modal insani seseorang mencakup pengetahuan dan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan maupun pengalaman (Jusmaliani, 2023).

Sumber pertumbuhan ketiga dari kemajuan teknologi. Teknologi yang lebih maju menyebabkan bertambahnya output yang dihasilkan oleh setiap satuan *factor a input* yang digunakan. Peningkatan output per unit input ini kita seb dengan peningkatan produktivitas. Dalam pengertian yang paling sederhana, kemajuan teknologi (*technological progress*) terjadi karena ditemukannya cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani pekerjaan sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien. Ini tentu saja mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi (Cholik, 2021).

Agglomerasi ekonomi merupakan pengumpulan atau pemusatan kegiatan ekonomidi lokasi tertentu, dalam hal ini lokasi perkotaan. Ini dapat terjadi antara lain karena lokalisasi produksi dan pusat-pusat pemasaran yang dipilih oleh produsen dan pengusaha. Di perkotaan produsen relatif lebih mudah mendapatkan tenaga kerja-tenaga kerja terampil, akses input dan keuangan, infrastruktur maupun jaringan pemasaran. Ini semua membuat wilayah perkotaan mnemiliki keunggulan untuk dipilih sebagai lokasi industry (Alfiani & Antomi, 2020). Terkonsentrasinya lokasi-lokasi usaha di perkotaan telah menarik tenaga kerja-tenaga kerja baik dari dalam wilayah maupun luar wilayah, termasuk dari desa. Akibatnya jumlah penduduk perkotaan semakin bertambah padat.

Padatnya penduduk perkotaan memancing produsen untuk memusatkan pemasaran produknya di wilayah perkotaan sehingga kota menjadi pusat perdagangan. Berkembangnya perdagangan diikuti oleh perkembangan jasa transportasi, komunikasi dan jasa-jasa lain. Dengan mempertimbangkan bahwa pusat-pusat perdagangan dan jasa banyak terdapat di perkotaan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa tingginya pertumbuhan sektor-sektor ini mengindikasikan cepatnya perkembangan perkotaan.

## **HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Urbanisasi**

Urbanisasi dapat diartikan dalam 2 pengertian; pertama sebagai perpindahan penduduk (migrasi) secara berduyun-duyun dari desa ke kota, dan kedua, proses perubahan struktural suatu wilayah perdesaan menjadi perkotaan. Penduduk desa tertarik untuk melakukan migrasi ke kota untuk alasan-alasan ekonomi maupun non ekonomi. Mereka tidak akan melakukannya apabila keadaan di desa sama dengan keadaan di kota. Nyatanya pembangunan yang terfokus di perkotaan membuat jurang perbedaan yang dalam antara desa-kota. Pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang baik di perkotaan cukup menarik bagi penduduk desa untuk melakukan migrasi. Pendidikan, pengobatan, dan aneka produk barang dan jasa di perkotaan merupakan daya tarik sendiri bagi penduduk nerdesaan. Di sisi lain, di perdesaan, terutama di daerah-daerah pedalaman, sarana dan prasarana umum masih jauh tertinggal. Misalnya jaringan transportasi, penerangan, alat-alat komunikasi, sarana perdagangan, lembaga-lembaga pendidikan (apalagi pendidikan tinggi), sarana kesehatan, dan lain-lain.

Alasan-alasan ekonomi banyak memotivasi penduduk desa untuk melakukan urbanisasi. Di antaranya adalah perbedaan kesempatan kerja dan pendapatan yang menyolok antara desa-kota. Terbatasnya fasilitas pendidikan di desa menyebabkan penduduk desa tertinggal dalam pendidikan dan ketrampilannya. Dengan berpendidikan rendah bahkan 1 tanpa pendidikan, dan tanpa ketrampilan yang memadai, penduduk desa yang melakukan migrasi ke kota tidak mendapatkan pekerjaan yang mereka idam-

idamkan, justru menambah masalah perkotaan. Perkembangan sektor formal tidak dapat menciptakan kesempatan kerja secepat pertumbuhan penduduk perkotaan. Untuk dapat bertahan hidup mereka yang tidak terakomodasi di sektor formal akan melakukan segala upaya melalui sektor informal yang dapat menampung mereka.

Mungkin banyak faktor yang mendorong penduduk desa bermigrasi ke kota, baik alasan ekonomi maupun alasan non ekonomi. Alasan non ekonomi misalnya mendekati keluarga, atau menempuh pendidikan yang lebih baik di kota. Untuk alasan ekonomi, ada 2 kekuatan yang mendorong terjadinya urbanisasi. Kekuatan pertama berasal dari desa. Jumlah penduduk yang semakin meningkat membuat lahan pertanian semakin menyempit. Luas lahan yang terbatas ini digunakan untuk menampung tenaga kerja yang semakin melimpah, sehingga dapat menurunkan produktifitas pertanian. Kondisi ini menyebabkan petani menerima pendapatan yang rendah. Rendahnya hasil yang diperoleh dari pertanian tidak dapat menopang kebutuhan untuk hidup layak. Tekanan hidup di desa inilah yang mendorong orang untuk mencari peluang yang lebih baik di kota.

Kekuatan kedua berasal dari daya tarik kehidupan kota. Kota merupakan pusat kegiatan ekonomi yang memberi peluang kesempatan kerja lebih luas. Berkembangnya perusahaan-perusahaan di perkotaan memberi harapan bagi penduduk desa untuk dapat memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang lebih baik. Selain peluang-peluang ekonomi, fasilitas-fasilitas kehidupan yang cukup lengkap di perkotaan menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk desa. Disparitas dalam kesempatan kerja, pendapatan dan fasilitas-fasilitas publik yang terpusat di kota inilah yang mendorong mobilitas penduduk dari desa ke kota. Pembangunan fasilitas publik seperti sekolah-sekolah, rumah sakit, pusat-pusat perdagangan, maupun pusat-pusat hiburan dan taman rekreasi terfokus di kota.

Situasi pedesaan mempunyai karakteristik-karakteristik antara lain; penduduk yang menyebar di banyak desa, tidak ada standar jam kerja, fasilitas public sedikit, masyarakat paguyuban dan bersifat altruisme/mementingkan orang lain, dan lain-lain. Karakteristik 'budaya desa' yang guyub dan altruisme terkadang justru menopang daya

tahan masyarakat terhadap kesulitan-kesulitan ekonomi. Menghadapi masalah secara bersama-sama terasa lebih ringan dibandingkan secara individual. Sedangkan masyarakat kota memiliki karakteristik; kepadatan penduduk tinggi, pertumbuhan penduduk cepat yang disebabkan baik oleh kesehatan yang baik sehingga tingkat harapan hidup tinggi, fertilitas lebih besar dari mortalitas dan arus migrasi dari desa, masyarakat patembayan dan individualis. Mengumpulnya masyarakat di wilayah kota memicu berkembangnya pusat-pusat perdagangan. Selanjutnya turut berkembang pula jasa-jasa transportasi, komunikasi dan jasa-jasa lainnya. Dengan banyaknya warga kota, pelayanan publik menjadi lebih berkembang dan lebih efisien. Tidaklah mengherankan jika sekolah-sekolah yang bermutu dan pelayanan kesehatan lebih baik di perkotaan.

Disparitas ekonomi tidak hanya terjadi antara desa-kota, tetapi juga mencakup wilayah yang lebih luas, kalau di Indonesia disparitas tersebut terjadi juga antara Kawasan Indonesia Timur dengan Kawasan Indonesia Barat. Pembangunan di berbagai daerah di Indonesia belum berbasiskan pada pilar-pilar keberlanjutan, sehingga masih terjadi disparitas daya saing daerah antara wilayah barat dan timur Indonesia. Sudah waktunya pilar lingkungan lestari, ekonomi, unggul, social inklusif, dan tata kelola, diletakkan sebagai kerangka pembangunan daerah. Wilayah Indonesia bagian barat memiliki daya saing tinggi, sedangkan Indonesia bagian timur berdaya saing rendah. Selain itu, permasalahan lain yakni pembangunan perekonomian di daerah belum berbasiskan pada pilar-pilar keberlanjutan. Sementara, kerangka pikir indeks daya saing daerah berkelanjutan terdiri dari empat pilar keberlanjutan yaitu lingkungan lestari, ekonomi unggul, sosial inklusif, dan tata kelola baik. Kunci utama untuk mengurangi disparitas daya saing daerah antara Indonesia bagian barat dan timur adalah membangun tata kelola dan leadership kepala daerah

Saat ini pun disparitas kemiskinan perkotaan dan perdesaan masih sangat tinggi. Tingkat kemiskinan perdesaan sudah kembali ke level sebelum pandemi, sementara perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Saat ini telah terjadi asumsi yang salah ihwal yang dapat mengatasi kemiskinan dan pengangguran melalui

pertumbuhan ekonomi yang melibatkan kegiatan ekonomi rakyat yang pelakunya adalah masyarakat miskin. Padahal, pengangguran dan kemiskinan adalah dua hal yang berbeda, menurutnya, orang yang menganggur belum tentu miskin. Misalkan, satu persen pertumbuhan diasumsikan mampu menampung 200 ribu sampai 400 ribu tenaga kerja baru, maka pertumbuhan 6,5 persen hanya mampu memperkerjakan 1,3 juta sampai 2,6 juta tenaga kerja dan tidak ada jaminan bagi penduduk miskin yang mencapai puluhan juta jiwa.

Selain penganggur terbuka, masalah yang timbul akibat meningkatnya jumlah penduduk adalah setengah penganggur. Seseorang dikatakan setengah penganggur apabila dalam waktu seminggu dia bekerja kurang dari 35 jam. Mayoritas setengah penganggur berada pada sektor pertanian dibandingkan sektor lainnya. Sektor pertanian merupakan sektor yang mendominasi pedesaan, sehingga dapat kita katakan bahwa tingkat setengah penganggur di pedesaan sangat tinggi. Ini merupakan cerminan tingginya tekanan hidup di pedesaan sehingga untuk pekerjaan tertentu dikerjakan berramai-ramai dari yang seharusnya.

### **Sektor Informal**

Pemusatan penduduk yang begitu banyak di perkotaan dapat bermanfaat bagi terciptanya skala ekonomis raksasa yang memungkinkan penghematan biaya-biaya untuk penyelenggaraan berbagai macam kegiatan produksi, penyelenggaraan pelayanan dan fasilitas sosial, mulai dari transportasi, potensi pasar, sumber daya trampil dan sebagainya. Meskipun ada manfaat-manfaat yang dapat diambil dengan adanya urbanisasi, namun masalah-masalah yang ditimbulkannya jauh lebih rumit dan kompleks. Masalah pertama adalah dalam penyediaan perumahan yang layak. Wilayah perkotaan yang semakin padat penduduk harus dibagi untuk pemukiman, perkantoran, perindustrian, perdagangan dan lain-lain. Terbatasnya lahan di perkotaan membuat nilai tanah demikian tinggi, sehingga tidak terjangkau oleh sebagian penduduk yang berpenghasilan rendah. Hal ini membuat terciptanya pemukiman kumuh yang terselip di antara bangunan-bangunan modern. Bahkan beberapa penduduk tidak mempunyai perumahan dan menjadi tuna wisma.

Masalah kepadatan penduduk ini merembet pada masalah-masalah selanjutnya seperti sanitasi lingkungan yang kurang bersih, pencemaran lingkungan hidup, penyediaan sarana dan prasarana air, listrik dan jasa-jasa sosial lainnya dan kemacetan lalu lintas serta kriminalitas. Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh penduduk migran, mereka tidak dapat tertampung dalam sektor formal yang menjanjikan penghidupan lebih baik. Para migrant dari desa pada umumnya kurang berpendidikan, miskin ketrampilan, tidak mempunyai akses keuangan maupun kelembagaan yang dapat menunjang modal insani mereka. Di sisi lain, kesempatan kerja di sektor formal diperkotaan hanya memberi peluang pada pekerja berpendidikan dan trampil. Situasi ini memaksa para migrant untuk terjun ke sektor informal.

Selama ini definisi isektor informal cenderung tidak baku, namun dua sumber studi yang dilakukan oleh ILO ( (International Labor Organization) ) mendeskriptifkan berikut bisa digunakan untuk menggambarkan sektor ini (Yustika, 2007). Pertama, sektor informal tidak terbatas pada pekerjaan-pekerjaan di pinggiran-pinggiran kota besar, tetapi bahkan juga meliputi berbagai aktivitas ekonomi yang antara lain ditandai dengan: mudah untuk dimasuki, bersandar pada sumber daya lokal. Usaha milik sendiri, oprasinya dalam skala kecil, padat karya dan teknologinya bersifat adaptif, ketrampilan dapat diperoleh di luar sistem sekolah formal, tidak terkena langsung oleh regulasi dan pasarnya bersifat kompetitif. Kedua, studi yang dikerjakan oleh Cole dan Fayissa menyebutkan sektor informal ini dengan cirri: ukuran usaha kecil, kepemilikan keluarga, intensif tenaga kerja, status usaha Individu, tidak resmi, tanpa promosi, dan tidak ada hambatan masuk.

Mengikuti Meier, sektor informmal memiliki karakteristik- karakteristi (Meier 1995); (i) mudah dimasuki, (ii) bersandar pada sumber daya sendiri, (ii) usaha nilik sendiri atau keluarga, (iv) skala usaha kecil, (V) padat karya dan teknologi adaptif, (vi) keahlian dapat diperoleh di luar sistem sekolah formal, dan (vii) tanpa regulasi dan pasar kompetitif.

Di Indonesia, pekerja di sektor formal atau informal dapat dibedakan berdasarkan status pekerjaan utamanya. Menurut BPS (Biro Pusat Statistik) status pekerjaan utama dibedakan menjadi:

1. Berusaha sendiri tanpa bantuan.
2. Berusaha dengan dibantu oleh buruh tidak tetap
3. Berusaha dengan pegawai/buruh.
4. Pekerja/buruh/karyawan.
5. Pekerja bebas di pertanian.
6. Pekerja bebas di non pertanian
7. Pekerja tak dibayar.

Pekerja digolongkan sebagai pekerja sektor formal apabila status pekerjaan utamanya berusaha dengan pegawai/buruh atau sebagai pekerja/buruh/karyawan (point 3 dan 4) Jumlah pekerja di sektor formal hanya 30,32% pada 2004 dan menurun menjadi 30,25% pada 2006, meskipun secara absolute naik. Sedangkan jumlah pekerja di sektor informal mencapai 69,68% pada 2004 dan meningkat menjadi 69,75% pada 2006. Ini menunjukkan bahwa sektor informal sangat besar peranannya dalam penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran. Dengan karakteristik-karakteristiknya, sektor informal memiliki kekuatan-kekuatan yang khas, sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk bertahan.

Sektor informal mampu untuk bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi, dikarenakan sifat-sifatnya yang mandiri, baik dalam penggunaan teknologi produksi maupun permodalannya. Karena sektor ini relatif mudah dimasuki, pekerja-pekerja yang semula bekerja di sektor formal dan mengalami kebangkrutan akibat krisis ekonomi, maka penurunan kesempatan kerja di sektor formal ini membuat para pekerja beralih ke sektor informal. Dengan demikian sektor informal menjadi katub pengaman bagi ketenagakerjaan. Dari sisi permintaan, krisis yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun ini membuat terjadinya pergeseran pola konsumsi masyarakat, dari barang/jasa sektor formal beralih ke konsumsi produk sektor informal.

2. Padat karya.

Teknologi produksi yang banyak digunakan oleh sektor informal bersifat padat karya sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja. Sistem pengupahan disektor informal tidak tergantung pada regulasi pemerintah mengenai pengupahan, sehingga pekerjajanya dapat menerima upah rendah, bahkan terkadang tanpa dibayar. Hal ini cukup membantu dalam penyerapan tenaga kerja yang menganggur.

3. Keahlian tradisional.

Produk-produk yang dihasilkan oleh sektor informal tidak membutuhkan sentuhan pendidikan formal. Keahlian itu biasanya diperoleh secara turun temurun, dari generasi ke generasi.

4. Permodalan menggantungkan pada kekuatan sendiri.

Kebanyakan pengusaha di sektor informal menggantungkan permodalan pada kekuatan sendiri, tabungan keluarga atau sumber-sumber dana informal, walaupun banyak juga pengusaha- pengusaha kecil yang menggunakan fasilitas kredit khusus dari pemerintah. Selain itu, investasi di sektor informal rata-rata jauh lebih rendah daripada investasi yang dibutuhkan sektor formal.

5. Dapat menopang sektor formal dan juga masyarakat golongan pendapatan rendah.

Produk barang/jasa yang dihasilkan oleh sektor informal dapat terkait dengan sektor formal, misal sebagai pemasok bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi sektor formal. Sebagai produk akhir, output yang dihasilkan oleh sektor informal dengan harga relative murah dapat dijangkau oleh Masyarakat kebanyakan. Masa depan sektor informal sangat ditentukan kemampuan sektor tersebut terutama dalam menghadapi persaingan dengan sektor formal atau produk impor. Kelemahan sektor informal tercermin dari kendala- kendala yang dihadapi oleh sektor tersebut, yang sering kali menjadi hambatan-hambatan serius bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Kendala-kendala yang banyak dialami pengusaha -pengusaha di sektor informal terutana adalah keterbatasan dalam Sumber daya modal, fisik. manusia dan teknologi. Selain itu sektor informal juga menghadapi kendala pemasaran, penyediaan bahan baku, pengelolaan, dan kemampuan komunikasi yang rendah.

## KESIMPULAN

Untuk mendukung kemajuan dan kemakmuran rakyat, pemerintah perlu secara serius untuk melihat ketimpangan pembangunan ekonomi sebagai hal yang serius. Perlu adanya *affirmative action* dan *positive-discrimination* untuk mengurangi gap pembangunan ekonomi. Strategi membangun sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan perlu memberdayakan tenaga kerja di daerah. Melibatkan setiap unsur daerah, penciptaan kewirausahaan daerah dan penjaminan harga merupakan instrumen kebijakan yang perlu dikaji untuk menahan angkatan kerja tidak eksodus ke perkotaan. Ke depannya kita bisa berharap bahwa migrasi-internal tidak hanya dilakukan oleh *low-skill employment*, tetapi juga oleh *high-skill employment*. Tersebar nya tenaga kerja yang memiliki keterampilan tinggi diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Membuat pertumbuhan ekonomi nasional menjadi lebih berkualitas dan lebih terdistribusi secara nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N., Rakib, M., Hasan, M., Nurdiana, N., & Supatminingsih, T. (2022). Kelayakan Ekonomi dan Strategi Pengembangan Usaha Pertanian Perkotaan KWT Angrek di Kota Makassar. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(4), 1411–1420.
- Alfiani, Y., & Antomi, Y. (2020). Analisis Aglomerasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Regional Di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019. *JURNAL BUANA*, 4(6), 1234–1244.
- Amini, A. F., Sugiharti, L., Aditina, N., & Meidika, Y. A. (2020). Analisis migran risen di sektor formal dan informal: Hasil Sakernas 2018. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23(1), 37–52.
- Cholik, C. A. (2021). Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi/ICT dalam Berbagai Bidang. *Jurnal Fakultas Teknik Kuningan*, 2(2), 39–46.

- Ervianto, W. I., & Felasari, S. (2019). Pengelolaan Permukiman Kumuh Berkelanjutan di Perkotaan. *Jurnal Spektran*, 7(2), 178–186.
- Hasbullah, J. (2023). *Tangguh dengan statistik: akurat dalam membaca realita dunia*. Nuansa Cendekia.
- Jusmaliani, M. E. (2023). *Pengelolaan Sumber Daya Insani*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Panorama, M., Litriani, E., & Kurniasih, L. (2019). Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Selatan Tahun 2010-2014. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 5(1), 90–101.
- Syah, H. (2013). Urbanisasi dan Modernisasi (Studi Tentang Perubahan Sistem Nilai Budaya Masyarakat Urban di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. *Uin Suska*, 5(1), 1–4.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.